

## Menatap gaduh politik elitis

Oleh Halili  
DOSEN PKNH FISE UNY

Setelah publik tak banyak mendiskusikan *reshuffle* dan koalisi, karena ditindih heboh *The Age* dan *Sidney Morning Herald*, bencana Jepang, lalu 'mercon' buku, dapat dipastikan SBY tidak akan mengutak-atik koalisi partai politik pendukung pemerintahannya. Meski tenang, tetap ada potensi bara dalam sekam. 'Faktor Golkar' sangat menentukan kembang kempis koalisi.

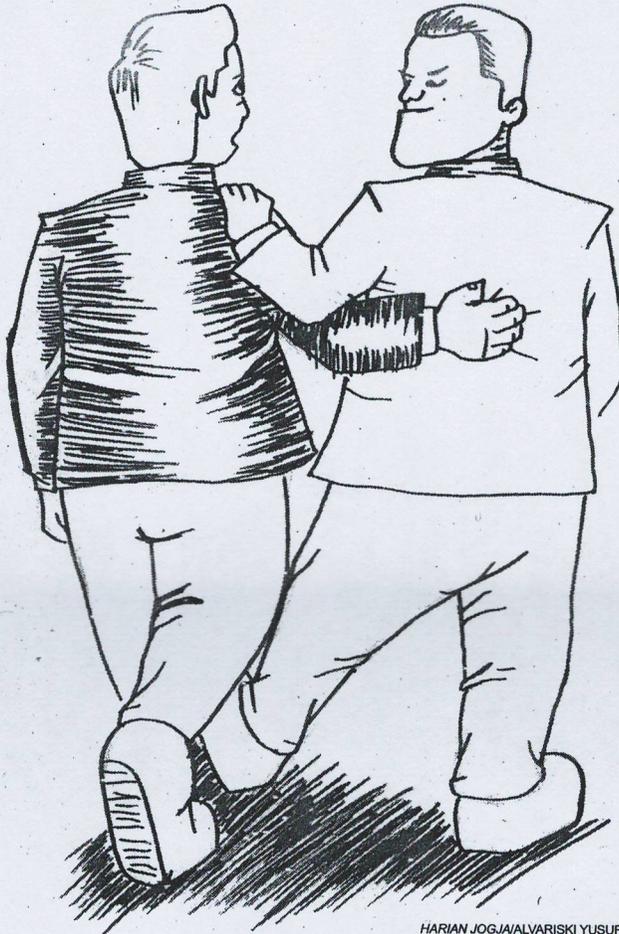
Berbeda dengan PKS yang suatu waktu bisa diganti, sumber daya Partai Golkar tak mudah membuat SBY berpaling. Tanpa Golkar, SBY akan kehilangan hampir seperempat dukungan politik formal selama ini. Tak saja soal postur elektoral, pengalaman politik Golkar pasti menggontarkan SBY, sebab Demokrat dan SBY merupakan 'politikus baru' dibandingkan Golkar.

Apalagi SBY dan Demokrat belum pernah berada pada posisi diametral-oposisional dengan Golkar di pemerintahan, sejak Demokrat berdiri. Sejak tahun 2004, setelah gagal memenangkan Capres-Cawapres sendiri, Golkar selalu satu kendaraan dengan Demokrat dan SBY, bahkan Golkar sering menjadi *bumper*. Wajar kalau pada jilid II pemerintahannya, SBY berharap banyak pada Golkar melalui institusionalisasi Setgab Koalisi. Demi Golkar, ketersinggungan PKS—yang notabene pengusung sejak awal pasangan SBY-Boediono—atas posisi Ketua Umum Golkar di Setgab pun diabaikan.

Sepak terjang Golkar banyak membuat Demokrat dan SBY kewalahan. Peran signifikan Golkar dalam menggonk Pansus Century yang ditentang kubu SBY menjadi pukulan telak yang memaksa SBY merelakan menteri terbaiknya, Sri Mulyani, hengkang dari kabinet pemerintahan.

Dalam isu anket mafia pajak, Golkar hampir mempermalukan SBY dan Demokrat. Dari sisi pengalangan dukungan, selisih empat suara dalam *voting* Sidang Paripurna bukan gambaran kekalahan memainkan isu. Kalau saja seluruh anggota Fraksi PDIP hadir dalam *voting*, sempurnalah 'keamiran' Demokrat memainkan isu politik di hadapan Golkar.

Hanya PDIP yang 'agak' dapat mengobati kegamangan politik SBY. Akan tetapi, alotnya tekad Megawati untuk tidak sebiduk dalam pemerintahan membuat SBY tidak mungkin menendang Golkar. Sampai kapanpun! Meski taruhannya efektivitas koalisi.



### Teorema koalisi

Dalam studi politik, tidak ada rumus baku bagaimana membentuk koalisi efektif, apalagi bila dikontekstualisasikan dengan kompatibilitasnya pada sistem pemerintahan presidensial atau parlementer. Hanya saja, ada dua teorema penting dalam membangun koalisi. Pertama, prinsip ukuran (*size principle*). William Riker (1962) dalam *The Theory of Political Coalitions* memperkenalkan teori *size principle* bahwa dalam *constant-sum games*, idealnya agen/aktor membentuk koalisi hanya sebesar yang dibutuhkan untuk mencapai 'imbangan' yang diinginkan.

Dalam kerangka demikian akan terbentuk minimum winning coalition. Artinya, koalisi tidak harus sangat besar sehingga menjadi mayoritas. Prinsip tersebut tampaknya tidak menarik bagi SBY. 'Koalisi sekadar menang' tidak membuat SBY yakin dengan dukungan politik di parlemen atas kebijakan-kebijakan

pemerintahannya. Karenanya koalisi gemuk 'enam partai plus' dibangun. Tak puas dengan itu, SBY beberapa kali 'menggoda' PDIP.

Teorema kedua, prinsip keinginan umum (*general will*) atau minimal rasionalitas pilihan individual dan kolektif merupakan dasar pembentukan koalisi (N de Condorcet, 1785). Keinginan bersama (yang diintroduksi oleh JJ Rousseau) dapat diturunkan dari kesamaan ideologi. Bila tidak, koalisi paling tidak harus dikerangkai pilihan individual dan kolektif anggota koalisi yang didiskusikan satu sama lain.

Dalam konteks Indonesia, ideologi jelas terlalu newah—untuk tak mengatakan tidak ada—untuk dapat menjadi pengikat koalisi pemerintahan. Namun rasionalitas pilihan politik bersama masih dapat didiskusikan antar anggota koalisi dan diturunkan dalam agenda setting, aturan prosedural, dan struktur manajerial. Tanpa itu, koalisi sesungguhnya kehilangan

basisnya yang paling fundamental.

Sebelas poin kesepakatan koalisi antara pimpinan partai politik dengan Presiden SBY pada 15 Oktober 2009 tampaknya belum menjadi pilihan rasional yang didiskusikan secara matang. Poin-poin yang menuntut fraksi parpol anggota koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintah, meski tanpa harus kehilangan daya kritis dan fungsi pengawasan, selama ini dibaca parpol anggota koalisi—terutama Golkar dan PKS—sebagai kooptasi yang tak mungkin mereka toleransi.

### Instabilitas koalisi

Pengesampingan dua 'hukum' tersebut akan menjerumuskan koalisi pada suasana *chaotic*. Instabilitas koalisi menjadi risiko politik yang mudah dituai. Apalagi secara teoretik, jarang ada koalisi yang sungguh-sungguh stabil (Itai Sened, 2001). Bahkan *chaos* yang disebabkan oleh instabilitas koalisi merupakan tampilan pokok kehidupan politik (Norman Schofield, 2001), kecuali jika ada seorang diktator atau *architect of order* yang meyakinkan semua pada inovasi institusional yang dibuatnya.

Semacam Soeharto pada era Orde Baru. Intensi SBY jelas tidak sejauh itu. Referensi politik paling ideal berupa minimum *winning coalition*—sehingga lebih memungkinkan terwujudnya keinginan bersama dan pilihan kolektif—telah diabaikan SBY. Momentum pasca 'pembungkangan' Golkar dan PKS telah dibuang percuma oleh Presiden.

Instabilitas koalisi dan pemerintahan dapat dipastikan akan banyak mewarnai politik nasional. Saat ini saja, belum betul-betul selesai topik *reshuffle* dan kocok ulang koalisi, petinggi Demokrat dan Golkar kembali bersilang pandangan soal posisi Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Setgab.

Ke depan, kegaduhan politik elitis seperti dalam 1,5 tahun pertama Pemerintahan SBY jilid II pasti berulang. Apalagi Golkar menegaskan tetap akan kritis di Parlemen. Kegaduhan transaksi politik elitis akan banyak mewarnai perpolitikan nasional dibandingkan operasionalisasi politik untuk rakyat.

Akibat tak terelakkan, agenda pemerintahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat akan banyak terbengkalai. Kekecewaan dan kemarahan rakyat akan bertambah dan menumpuk.

Risiko tersebut mestinya lebih menakutkan bagi SBY daripada sekedar kalkulasi dukungan politik formal dan transaksi politik dengan Golkar.